

Sensitivitas Interkultural Antarumat Beragama di Kota Palembang

Adi Inggit Handoko, Rindang Senja Andarini, Febrimarani Malinda

Universitas Sriwijaya

Jl. Palembang–Prabumulih Km. 32, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan 30862

Email: adiinggit@fisip.unsri.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v19i2, Desember.4011

Submitted: December 2020

Reviewed: July 2021

Accepted: September 2022

Abstract: *Religious differences often trigger conflict in a multicultural society. Palembang, with its diverse community characteristics, is claimed as zero conflict area. This study aims to see intercultural sensitivity among religious people in Palembang. This qualitative research uses a case study approach with the theory of the Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders. The results shows that each religious group tries to emphasize ethnorelativism through tolerance, mutual cooperation in building houses of worship, friendship relations with different adherents. However, at some levels, ethnic prejudices and stereotypes against different religious people still emerge.*

Keywords: *conflict, intercultural communication, intercultural sensitivity,*

Abstrak: *Perbedaan agama sering menjadi pemicu konflik masyarakat yang multikultur. Palembang dengan karakteristik masyarakatnya yang beragam mendapat klaim sebagai wilayah zero conflict. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sensitivitas budaya (intercultural sensitivity) antarumat beragama di Palembang. Penelitian kualitatif ini memakai pendekatan studi kasus dengan teori the Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemuka agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kelompok agama berupaya menekankan etnorelativisme melalui toleransi, gotong royong membangun rumah ibadah, hubungan pertemanan dengan pemeluk berbeda. Namun, dalam beberapa tataran, prasangka dan stereotip etnis terhadap umat berbeda masih muncul.*

Kata Kunci: *komunikasi antarbudaya, konflik, sensitivitas budaya*

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras. Keberagaman yang ada membuat berbagai konflik menjadi tak terelakkan. Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun pascareformasi setidaknya terdapat 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Sebanyak 65 persen kasus kekerasan berlatar belakang agama, 20 persen kekerasan etnik, 15 persen kekerasan berbasis gender, dan kekerasan seksual sebanyak 5 persen

(Welianto, 2020). Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar konflik disebabkan karena isu agama, maka upaya pencegahan potensi konflik menjadi sebuah keniscayaan.

Pembahasan mengenai upaya pencegahan konflik antarumat beragama sangat erat kaitannya dengan komunikasi antarbudaya karena agama merupakan salah satu penentu utama identitas budaya. Triandis dan Triandis (dalam Ameli & Molaei, 2012, h. 31-39) menyatakan bahwa

ras, kelas sosial, agama, dan nasionalitas merupakan faktor yang menentukan jarak sosial (*social distance*).

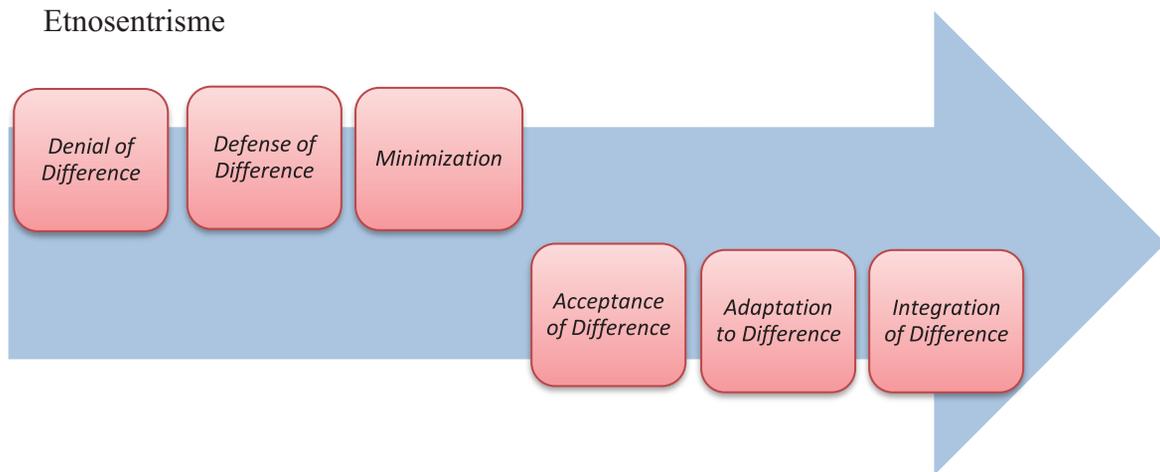
Menurut Rey (1997, h. 161), agama bukan hanya merupakan salah satu elemen dari budaya, agama bahkan dapat menjadi budaya itu sendiri karena memiliki asumsi, praktik dan perspektif terhadap kehidupan (*world view*) yang dipegang bersama. Fenomena *ethno-religious* menunjukkan keterikatan antara unsur agama dan etnisitas. Idi (2018) menjelaskan fenomena *ethno-religious* sebagai fenomena di mana konflik agama sering kali berpadu dengan masalah etnisitas. Fenomena ini lazim terjadi di banyak negara di Asia Tenggara dengan masyarakat yang majemuk. Misalnya, konflik antara minoritas Muslim Moro dengan mayoritas Buddha di Filipina, Konflik agama etnis Rohingya di Myanmar, serta konflik agama Etnis Uighur di Tiongkok. Lekatnya permasalahan agama dengan etnis ini membuat pendekatan komunikasi antarbudaya sering digunakan ketika meneliti konflik agama (Idi, 2018, h. 6-8).

Kompetensi antarbudaya (*intercultural competence*) merupakan kunci dari interaksi antarbudaya yang mana kompetensi ini turut dipengaruhi oleh *intercultural sensitivity*. Bennett (dalam Jackson, 2012, h. 312) menyatakan bahwa pengalaman seseorang dalam menerima perbedaan budaya dapat menentukan bagaimana kompetensi antarbudayanya. *Intercultural competence* merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam situasi budaya dan kemampuan menyesuaikan

dalam beragam konteks budaya. Sedangkan *intercultural sensitivity* merupakan proses perkembangan dalam diri seseorang untuk menerima dan mengakomodir perbedaan budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanpa didahului dengan penerimaan perbedaan, maka kompetensi antarbudaya sulit untuk terwujud.

Secara teoritis konsep *intercultural sensitivity* diuraikan oleh M. J. Bennett (1993) melalui *the developmental model of intercultural sensitivity* (dalam Jackson, 2012, h. 312-313). *The developmental model of intercultural sensitivity* (DMIS) merupakan model yang menjelaskan proses perkembangan seseorang dalam merespons dan mengalami perbedaan budaya. Perkembangan ini digambarkan sebagai sebuah spektrum (gambar 1) yang berkembang dari pola pikir etnosentris (perspektif yang kurang menilai perbedaan budaya) menuju etnorelativisme, yaitu perspektif yang memerlukan tingkat kesadaran dan sensitivitas yang tinggi atas perbedaan budaya (Bennett dalam Morgan & Sandage, 2016, h. 133).

Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk memandang standar kelompok sendiri sebagai yang terbaik dan menilai semua orang di luar kelompoknya dengan standar tersebut. Sikap etnosentris sebenarnya membuat seseorang memiliki rasa bangga dan aman akan kelompoknya, namun etnosentrisme dalam tataran yang ekstrem dan kaku dapat merusak hubungan. Sedangkan yang dimaksud dengan etnorelativisme adalah kemampuan untuk memahami tindakan komunikasi atau



Gambar 1 *The Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) Milton Bennett*

Sumber: Littlejohn dan Oetzel (2017, h. 399)

pandangan orang lain di luar kelompoknya sesuai dengan *cultural frame of reference* orang tersebut (Jackson, 2012, h. 366).

DMIS terdiri atas enam tataran. Tataran pertama, penolakan perbedaan (*denial of difference*) di mana orang cenderung memiliki kontak terbatas dengan orang dari budaya berbeda. Tataran kedua, pertahanan dari perbedaan (*defense of difference*) di mana orang mampu mengenali dan mengakui adanya perbedaan budaya, namun perbedaan tersebut lebih direndahkan daripada diapresiasi. Tataran ketiga, pengurangan perbedaan (*minimization of difference*) ditandai dengan adanya pengakuan atas perbedaan budaya, namun belum menyentuh perbedaan substansial, seperti nilai dan norma (Littlejohn & Oetzel, 2017, h. 399). Pada tataran *minimization* ini sikap etnosentris merendah dan telah muncul *cultural self-awareness*, meskipun terbatas (Bennett dalam Jackson, 2012, h. 313).

Tataran keempat, penerimaan perbedaan (*acceptance of difference*). Orang pada tataran ini mengapresiasi dan menghormati perbedaan nilai-nilai

budaya. Tataran kelima, adaptasi perbedaan (*adaptation of difference*). Adaptasi perbedaan membawa perubahan gaya komunikasi menuju interaksi yang lebih baik dengan anggota kelompok berbeda. Tataran keenam, integrasi perbedaan (*integration of difference*), yakni kemauan untuk mengadopsi perbedaan keyakinan dan perilaku budaya ke dalam kehidupan diri sendiri (Littlejohn & Oetzel, 2017, h. 399).

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) Milton Bennett tidak hanya digunakan sebagai kerangka teori dalam lingkup penelitian interaksi antarbudaya, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam lingkup interaksi antarumat beragama (*interreligious group*). Saied Reza Ameli dan Hamideh Molaei (2012) yang meneliti bagaimana *intercultural sensitivity* antara Muslim Shia dan Muslim Sunni di Iran menemukan bahwa interaksi antara kedua kelompok beragama ini berada pada level *minimization* di mana kedua kelompok agama tersebut cenderung menyoroiti persamaan dan mengabaikan perbedaan (Ameli & Molaei, 2012, h. 31-

40). Penelitian Fuller (2007) terhadap mahasiswa ilmu teologi menunjukkan bahwa *intercultural sensitivity* dipengaruhi oleh pengalaman interaksi dengan masyarakat yang berbeda budaya (Fuller, 2007, h. 321-332).

Selain itu, DMIS juga diterapkan dalam konteks kajian agama oleh Jonathan Morgan dan Steven J. Sandage (2016) yang mengembangkan *Model of Interreligious Sensitivity* yang diadopsi dari DMIS sebagai kerangka berpikir dalam interaksi lintas agama (Morgan & Sandage, 2016). Berdasarkan identifikasi mengenai pentingnya *intercultural sensitivity* dalam menjaga komunikasi antarumat beragama dan melihat status Kota Palembang sebagai daerah zero konflik agama, maka peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana *intercultural sensitivity* antarumat beragama di Kota Palembang.

METODE

Paradigma penelitian ini adalah *interpretif*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus menurut Robert K. Yin (2014) lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* (Yin, 2014, h. 1-2). Menurut Kriyantono (2006), penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya bisa sangat terbatas (Kriyantono, 2006,

h. 56). Studi kasus adalah eksplorasi yang mendalam dari beragam perspektif terhadap kompleksitas dan keunikan suatu program, institusi, kebijakan, proyek, atau sistem dalam konteks kehidupan nyata yang didasarkan pada penelitian (*research-based*) dan bukti (*evidence-based*) (Simons, 2009, h. 3-4). Menurut Swanborn (2010), penelitian studi kasus dapat dilakukan dalam tingkatan mikro (individu dan hubungan antarpribadi), meso (organisasi, institusi), atau tingkatan makro (komunitas, masyarakat), serta dapat melibatkan satu aktor atau lebih.

Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di lingkup komunitas, yaitu komunitas umat beragama. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu, maupun individu dengan kelompok (Ratna, 2010, h. 222). Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2010, h. 122). Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, maupun laporan. Sifat utama dari data ini adalah tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen yang dimaksud adalah pemberitaan media dan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Sementara itu, wawancara dilakukan dengan para informan yang merupakan pemimpin agama, antara lain: pendeta sekaligus Pembimbing Masyarakat Kristen (PEMBIMAS) sebagai informan pertama, ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sumatra Selatan sebagai informan kedua, dan ustadz sekaligus pengurus Front Pembela Islam (FPI) di Sumatra Selatan sebagai informan ketiga. Berkaitan dengan etika penelitian, ketiga narasumber kami samarkan dengan maksud untuk menghindari dampak negatif yang mungkin bisa diarahkan kepada narasumber.

HASIL

Pada bagian hasil, penulis mencoba menguraikan tataran *intercultural sensitivity* setiap kelompok agama dari sudut pandang pemimpin agama. Perspektif para pemimpin agama penting dilihat karena mereka memiliki potensi besar untuk memengaruhi masyarakat, pembuat kebijakan, dan kebijakan yang berkaitan dengan praktik kehidupan beragama (Karim, Saili, & Khambali, 2014, h. 77-86). Selain itu pemimpin agama juga sangat berperan dalam mengimplementasikan dialog antarumat beragama dan menjadi mediator resolusi konflik ketika terjadi konflik yang dipicu masalah agama.

Penolakan Perbedaan (*Denial of Difference*)

Penolakan perbedaan muncul sebagai akibat dari kurangnya perhatian dan ketidakmampuan dalam memaknai

perbedaan budaya (Bennett, 2015, h. 521-523). Etnosentrisme pada tataran penolakan perbedaan masih sangat kental, biasanya termanifestasi dalam perilaku isolasi dari interaksi secara langsung dan penghindaran diri dari kelompok yang berbeda.

Dalam konteks kehidupan beragama di Kota Palembang, penolakan perbedaan yang ekstrim seperti bentrokan massa maupun kekerasan belum pernah terjadi. Para pemimpin agama yang menjadi informan dalam penelitian ini mengakui bahwa selama ini konflik yang pernah muncul dapat dikendalikan, sehingga tidak tereskalasi menjadi konflik yang besar. Konflik yang terjadi lebih banyak terkait dengan masalah pembangunan rumah ibadah.

Sebenarnya kalau konflik yang terlalu signifikan atau yang besar itu *ndak*, hanya konflik itu kadang gini, konflik itu terjadi ketika terjadi dalam hal mengurus IMB. Iya IMB tempat ibadah karena kitakan ada aturan SKB Dua Menteri. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

SKB Dua Menteri yang disebut Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dalam pelaksanaannya dianggap menghambat pendirian sejumlah tempat ibadah warga minoritas. Pasal 14 mengenai syarat pendirian rumah ibadah yang diwajibkan memenuhi minimal 90 nama umat pengguna rumah ibadah dan

mendapat dukungan setidaknya 60 warga setempat (Rizki, 2020).

Meskipun tidak sampai tereskalasi menjadi konflik besar, beberapa permasalahan terkait pendirian rumah ibadah memang muncul. Menurut salah satu informan, konflik antara umat Kristen dan Muslim terkait pendirian gereja pernah terjadi di beberapa wilayah di Palembang, namun terbatas.

Nah, selama saya dua periode di FKUB, yang sering bentrok itu Kristen Protestan dengan Muslim di Alang-Alang Lebar, Tanjung Harapan, Jakabaring, dan daerah M. Isa itu sempat bentrok yang saya ikut rapatnya sampai mengundang BIN (Badan Intelijen Negara) itu waktu di Alang-Alang Lebar. Jadi ternyata umat Kristen di sana menurut cerita pendetanya sudah ada 3000 orang, tetapi ditolak oleh umat muslim melalui AMPERA Nah, kalau kita berbicara syarat lengkap kan, tetapi terbentur dengan kalau dari umat lain tidak memberi izin ya tidak bisa jadi, ini akibat karena keluarnya SKB Dua Menteri itu. Nah, dulu tidak ada aturan seperti itu tidak terjadi. (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Selanjutnya, informan ketiga mengatakan terkait dengan permasalahan pembangunan rumah ibadah yang bergantung pada hubungan antara pimpinan jemaat atau gembala sidanganya dengan warga sekitar. Pendekatan dengan masyarakat di sekitar rumah ibadah sangat penting dilakukan.

Untuk izin IMB mendirikan bangunan tempat ibadah itu ya kadang

terkendala di situ, dibilang konflik tidak cuman kadang-kadang ya karena mereka hanya satu atau dua atau tiga keluarga terkadang tanda kutip semacam agak sedikit ya susah kan gitu untuk IMB-nya. *Tapi* menurut saya sih gini, selama kalau biasanya kan kalau kami di Kristen biasanya kan mendirikan gereja itu pasti ada pendetanya atau pimpinan jemaat atau gembala sidanganya ya kan gitu selama pimpinan jemaat atau gembala sidang hidup bermasyarakatnya bagus ya baik. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Penolakan perbedaan yang muncul dalam bentuk isolasi atau penghindaran diri dari interaksi antarumat beragama di Palembang tidak menonjol. Sikap penolakan berupa diskriminasi secara verbal justru ditemukan dalam interaksi secara *online* melalui media sosial, bukan interaksi tatap muka secara langsung antaraumat beragama yang satu dengan umat yang lain.

Terkait dengan perlakuan diskriminatif dari umat beragama lainnya, informan pertama yaitu Ustadz Mustofa Abdullah yang merupakan pengurus aktif Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Selatan mengakui tidak pernah mengalaminya.

Selama di kota Palembang ini kalau unsur yang negatif dari luar Islam ke Islamnya sendiri sampai saat ini bisa dikatakan *nggak* ada atau antara ada dan tiada. Kenapa demikian karena saat kita dipicu untuk sesuatu yang harus kita keluar untuk berbicara ternyata di lapangan itu mereka *nggak* terlalu *gimana gitu*. Contohnya, dari *Facebook*, dari media sosial, banyak yang saling menghina agama itu orang-orang yang dungu yang *gak* bisa pakai *gadget*,

mereka *nggak* bisa mengaplikasikan untuk apa sih sebetulnya ini, *nggak ngerti* dan *nggak* paham. (Informan ketiga, ustadz sekaligus pengurus aktif FPI Sumtra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Diskriminasi yang dibahas oleh Ustadz tersebut adalah diskriminasi verbal pada lingkup individu, berupa tindakan menghina atau menistakan agama (*debasing*) melalui media sosial. Menurut Martin Reisigl (2007) diskriminasi tidak terbatas pada lingkup institusional melalui kebijakan yang diskriminatif (Reisigl, 2007, h. 65). Perlakuan kepada kelompok sosial tertentu atau anggota kelompok tertentu yang berbeda secara tidak adil melalui tindakan membatasi atau menekan, mendiskreditkan, menista, merendahkan, memfitnah juga termasuk dalam diskriminasi.

Pertahanan Diri (*Defense of Difference*)

Tataran kedua dari *Developmental Model of Intercultural Sensitivity* adalah pertahanan diri (*defense*) yang ditandai dengan *polarizing dualistic*, pandangan hidup yang terpolarisasi antara kita-mereka atau *us-them* (Bennett, 2015, h. 521). Karakteristik yang menonjol dalam tataran *defense* adalah cara berpikir yang terlalu menghakimi dan stereotipikal. Informan kedua dan ketiga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sentimen negatif yang didasari oleh perbedaan agama lebih dominan muncul dalam bentuk stereotip dan prasangka.

Sentimen negatif dalam kehidupan bermasyarakat pernah diterima di lingkup pekerjaan oleh informan kedua, yaitu

Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan yang merupakan Pembimbing Masyarakat Kristen (PEMBIMAS) di Departemen Agama. Sikap etnosentris muncul dalam interaksi antarpribadi dari teman satu kantor, namun persentase sentimen negatif ini kecil dan telah terselesaikan dengan baik. Sikap penolakan telah berubah ke fase yang lebih baik, yaitu penerimaan perbedaan.

Jadi sebenarnya kalau saya waktu sekolah karena kebetulan kan di Methodist jadi *dulu ndak* begitu, *tapi* waktu saya pertama kali pernah jadi PNS, saya bekerja karena saya kan seorang diri hanya sayalah satu-satunya orang Kristen, saya belum di sini *dulu*, saya di Prabumulih ya kan karena saya sendirian mungkin ada temen saya itu saya pikir bukan karena faktor benci sih mungkin karena apa, saya *ndak* tahu apa faktornya. Pernah dia menyinggung masalah iman saya seperti itu, *tapi* saya senyum saja saya *ndak* marah, saya tidak membalas, justru saya ampuni dia, akhirnya saya kawan akrab sama dia. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Pengalaman terkait stereotip dari masyarakat di luar umat Buddha (*out-group*) terhadap umat Buddha (*in-group*) masih didominasi dengan stereotip berbasis etnis. Masyarakat sering beranggapan salah bahwa semua penganut agama Buddha beretnis Tionghoa. Kekeliruan dalam membedakan dan menyebutkan etnis Tionghoa secara benar juga masih muncul di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh informan ketiga, Pendi yang merupakan Ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sumatera Selatan.

Setiap kali kita mengadakan Munas, yang kita bahas adalah bagaimana kita *merubah* pandangan, khususnya umat muslim terhadap orang Tionghoa bahwa orang Tionghoa ini orang China, padahal bahwa kita bicara orang China itu orang asing di RRC, kalau kami ini orang Tionghoa, bukan orang China, nah itu yang sulit sampai hari ini. (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Kata “China” yang dilontarkan oleh umat lain dalam beberapa interaksi antarumat mengandung prasangka dan sentimen rasisme. Dalam suatu kesempatan, saat umat Buddha melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan, beberapa orang menolak dan mengucapkan “ini sumbangan orang China, ini tidak boleh diterima”.

Saya ada kasus *dulu* di Kemang Manis, kebetulan karena saya juga mengurus sertifikat tanah, kebetulan ada satu petugas ukur, dia teman dekat saya, dia muslim, jadi waktu itu mendirikan masjid, dia lagi menggalang dana, saya diminta sumbang ambal, saya sumbang. Waktu itu disampaikan nah ada salah satu pengurus masjidnya tidak terima karena ini sumbangan orang China, ini tidak boleh diterima Nah, itu istilahnya dia berpikir kami ini menyumbang, kami ini punya maksud, padahal kami tidak berpikir sampai sana. (Informan kedua, Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Pemakaian kata “China” dalam konteks interaksi antara umat Buddha dengan umat Muslim tersebut merupakan salah satu bentuk

etnonim. *Etnonim* adalah sebuah nama yang ditujukan kepada sebuah kelompok etnis yang sering kali dipakai dalam konteks yang berkonotasi negatif untuk menghina. Elemen semantik dapat menjadi alat diskriminasi verbal, contoh penggunaan kata “*Jude*” (Yahudi) dalam idiom masyarakat Jerman “*So ein Jude!*” yang berarti “Seperti lintah darat yang mengeruk keuntungan” (Reisigl, 2007, h. 365-409).

Stereotip, prasangka, dan diskriminasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada masyarakat etnis Tionghoa, masyarakat etnis lainnya juga mengalami namun tingkat kasusnya jika dilihat secara sosio-historis berbeda. Stereotip yang ditujukan pada etnis Tionghoa sering kali melibatkan keraguan terhadap komitmen nasional masyarakat etnis Tionghoa sebagai bagian dari komponen bangsa. Selain itu terdapat kecurigaan bahwa etnis Tionghoa terlibat dalam lingkaran kekuasaan dan menjadi penentu proses politik dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial kemudian menjadi penyebab melekatnya stereotip terhadap etnis Tionghoa (Siregar dalam Juditha, 2015, h. 89-90).

Penolakan bantuan yang dipicu oleh prasangka terhadap umat beragama berbeda juga terjadi saat bakti sosial oleh gereja yang ditolak oleh sejumlah warga beragama Muslim. Penolakan ini muncul karena adanya prasangka bahwa bantuan yang diberikan memiliki tujuan kristenisasi, yaitu upaya untuk mempersuasi orang lain untuk memeluk agama Kristen.

Sebenarnya sih secara kalangan besar *ndak*, *tapi* mungkin yang kecil ada,

kadang-kadang kan *gini* di Kristen nih kan suka bakti sosial *bagi* sembako kadang-kadang mohon maaf ini, kadang-kadang itu di sebagian orang sih, orang pikir ini jangan-jangan kristenisasi. Nah, sebenarnya *ndak* karena kita nih gerejanya memang punya program masing-masing, kita kan punya komisi sosial Kadang-kadang *ndak* bisa juga dicap ketika kami membuat acara sosial dibidang kristenisasi itu kurang tepat *gitu* karena bukan kristenisasi *berbagi* kasih itu.” (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Prasangka antarras dan antaretnik merupakan generalisasi yang keliru terhadap perasaan atau suatu hal yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perbedaan antarkelompok; kedua, nilai-nilai budaya kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas; ketiga, stereotip antaretnik; keempat, perasaan superior dari kelompok etnik atau ras mayoritas atas kelompok etnik lainnya (Johson dalam Liliweri, 2018, h. 373). Prasangka umat Muslim terhadap umat Buddha dalam hal ini dipicu karena stereotip antaretnik. Sedangkan prasangka yang muncul dalam interaksi umat Kristen dan Islam, merujuk pada penjelasan Zastrow (1989) bersumber dari proyeksi untuk mempertahankan ciri kelompok secara berlebihan (Liliweri, 2018, h. 373). Gundykunst (1991) menjelaskan bahwa *mindset* “kami” versus “mereka” memperkuat prasangka terhadap kelompok yang berbeda (Liliweri, 2018, h. 373-375). “Kami” di sini adalah kelompok dalam satu agama/keyakinan yang sama,

sedangkan “mereka” adalah kelompok pemeluk agama/keyakinan yang berbeda.

Pengurangan Perbedaan (*Minimization*)

Tataran ketiga dari *intercultural sensitivity* adalah *minimization*, yaitu tumbuhnya pengenalan atas perbedaan antarkelompok, tetapi orang-orang yang terlibat dalam interaksi lebih menekankan persamaan dibandingkan dengan perbedaan. *Minimization* ditandai dengan beberapa karakteristik. Pertama, makin besar pengakuan atas perbedaan budaya meskipun persamaan lebih dinilai dibandingkan perbedaan. Kedua, keterbukaan terhadap budaya lain serta kemauan untuk berinteraksi dan berkomunikasi lintas kelompok. Ketiga, kecenderungan perilaku menghargai dan toleran, menghindari konflik, mencari kesamaan, dan menahan penilaian mengenai kelompok budaya lain (Bennett, 2015, h. 522).

Minimization terwujud dalam dua bentuk, yaitu *physical universalism* dan *transcendent universalism*. *Physical universalism* merupakan *sense of commonality* yang muncul dari persamaan fisik secara biologis. Sedangkan *transcendent universalism* adalah *sense of commonality* yang muncul dari komitmen dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum, seperti hak asasi manusia, serta orientasi nilai-nilai universal atau nilai-nilai agama (Bennett, 2015, h. 520-522).

Setiap umat beragama memegang satu nilai atau prinsip kebaikan yang diajarkan oleh semua agama. Hal yang membuat setiap umat beragama sejajar dengan umat beragama lainnya adalah persamaan

anjuran nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang terkandung pada setiap agama dan dipegang oleh setiap umat. Maka persamaan nilai kebaikan inilah yang memunculkan perasaan yang sama (*sense of commonality*) di antara umat beragama yang berinteraksi.

Kalau di dalam agama Islam, kami meyakini dan kami wajib untuk mengikuti suri tauladan kami, itu lah junjungan kami nabi kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu diutus ke dunia untuk *Rahmatan Lil'alam*. Mangkanya kalau dari Islamnya sendiri dari internal itu sendiri bukan main sebetulnya Islam itu indah Orang yang belum bijaksana berarti dia belum beragama. *Tapi* orang yang *dikit* ilmu agamanya, pengetahuan yang sekadar kadar *aja*, *tapi* kebijaksanaan tinggi, dia udah beragama. (Informan ketiga, ustadz dan pengurus aktif FPI Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Penerimaan Perbedaan (*Acceptance*)

Acceptance adalah tataran keempat dalam *intercultural sensitivity* yang merupakan transisi dari etnosentrisme menuju tataran awal etnorelativisme. Berbeda dari *minimization* yang lebih didominasi dengan upaya mencari persamaan, *acceptance* tidak hanya terbatas pada pengakuan perbedaan, tetapi ada ketertarikan yang meningkat terhadap perbedaan dan penerimaan bahwa setiap kelompok memiliki kedudukan yang sama tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk (Bennett, 2015, h. 522). Interaksi antara ketiga kelompok agama ini menunjukkan dua bentuk penerimaan, yaitu sikap menghormati perbedaan perilaku dan menghormati perbedaan nilai-nilai yang

diyakini dan dipegang oleh setiap kelompok.

Semacam warna kalau satu warna kurang bagus, kurang cantik, kalau dia dipadukan dengan berbagai warna, sama halnya kita mengadakan kegiatan, semua bisa ikut, yang penting tidak mengarah kepada menyalahkan prinsip masing-masing itu kan jadi enak. Makanya kita ada membentuk forum kebangsaan, itu kan gabungan dari semua pemuda di berbagai agama, kan itu salah satu tujuannya itu. (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Kami menganggap bahwa diri kami atau agama yang kami miliki yang kami emban saat ini ialah agama di tengah-tengah dan harus digarisbawahi kita boleh berbicara ini tanpa meyakini yang lain menganggap (agama yang lain) itu ada boleh, *tapi* tidak meyakini ... kalau meyakini tidak boleh, *tapi* kalau menganggap ada boleh kenapa karena dalilnya dalam surah Al-Baqarah yakni umat yang ada di tengah-tengah. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Budaya itu sebenarnya tidak harus menghilangkan apa yang saya mau bilang ya, tidak harus menghilangkan identitas iman kita sebenarnya, justru kita bisa masuk melalui budaya seperti itu Sepanjang yang saya tahu ya mereka (jemaat) menerima dan rata-rata jemaat itu dalam lingkungan mereka sendiri pun mau hidup bermasyarakat dengan baik, sekalipun mereka berada di tengah-tengah lingkungan mayoritas. Mereka tidak memiliki masalah apa pun. (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi merupakan kapasitas seseorang untuk menyesuaikan perilaku dan cara berpikirnya sesuai dengan pola perilaku dan cara berpikir dari budaya lain (Bennett, 2015, h. 523-525). Bennett menjelaskan terdapat dua dimensi dalam adaptasi, yaitu empati dan *pluralism*. Empati adalah upaya untuk mengalami dan memahami budaya lainnya. Pluralisme adalah komitmen filosofis untuk memosisikan bahwa terdapat realitas budaya yang beragam dan untuk benar-benar menginternalisasi budaya lain diperlukan pengalaman hidup berdampingan dengan budaya lain di mana seseorang dapat memperoleh kerangka acuan (*frame of reference*) dari budaya yang beragam.

Sikap pluralis dari para pemimpin agama dan umat yang dipimpin dapat dilihat melalui komitmen hidup berdampingan di tengah pluralitas. Ustadz sekaligus pengurus FPI Sumsel menyatakan bahwa setiap keluarga non-Muslim yang tinggal di lingkungannya menghargai setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di kediaman ustadz bahkan mereka dengan senang hati membuka pagar rumahnya untuk menyediakan lahan parkir. Sebaliknya ketika tetangga yang non-Muslim menyelenggarakan ibadah di rumah, maka ustadz juga menyediakan lahan parkir di rumahnya.

Tinggal di lingkungan yang multikultural kalau saya nyaman malah saya tinggal saya punya majelis, sebelah kanan saya itu agamanya Protestan, kiri saya Katolik, belakang saya Kristen, di depan saya orang

Chinese, malah di depan saya itu orang yang tidak beragama tinggal satu kampung. Jadi setiap malam minggu, Mbak, Mas, kita adakan kajian dengan pembacaan pakai rebana segala *macem* Jadi kalau tinggal di multikultur dan sebagainya itu nyaman nyaman saja, *situ* balik-balik juga ke individualis manusianya. Manusia jadi tadi saya bilang sama orang belum bijaksana berarti dia belum beragama. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Tampak terjalin toleransi yang baik antarumat beragama terhadap praktik ibadah umat beragama lainnya. Toleransi ini membawa kenyamanan untuk hidup di lingkungan multikultural.

Pluralisme ini juga tampak menonjol melalui tindakan saling mendukung dalam pembangunan rumah ibadah maupun peringatan hari raya umat lainnya, salah satunya tindakan umat Buddha yang menolong dalam pembangunan masjid.

Jadi kita komunikasi, saling kunjungan, atau kita mau memberikan bantuan, misalnya mereka, 'Pak kira-kira majelis mana yang butuh bantuan, misal masjid mana yang butuh bantuan'. Jadi seperti itu lah. Untuk secara umum dalam bentuk bantuan, misalnya mau bangun masjid, contohnya di KM7 masjid mau apa, kita bantu seperti semen, pasir, kalau lagi kurban, kami sumbang kambing. (Informan kedua Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Wilayah Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Gotong royong antara umat Muslim dan Kristen dalam pembangunan rumah ibadah juga dialami oleh Majelis Gereja Methodist Palembang.

Ya jadi kita saling ini sih saling *support* sih karena *gini* ada sebagian gereja tuh yang punya program ketika ada hari raya contohnya Kurban di Islam ya ada juga sebagian gereja tuh *nyumbang* juga. Kambing kalau mereka mau, gereja besar *nyumbang* seekor sapi ada juga itu. Ketika ada rumah ibadah lagi bangun nih gotong royong kalau pun dia *ndak* bisa kasih batu, semen Jadi mereka tuh misalnya lagi ada gereja yang dibangun yang Muslim juga ikut bangun jadi tukang ada juga masjid yang lagi bangun juga ikut yang kristen juga bantu, nah itu kan indah sekali *loh*, luar biasa.” (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya komitmen afektif yang mendalam untuk hidup dan berinteraksi secara efektif dengan orang dari kelompok sendiri maupun dengan orang dari kelompok agama lain. Komitmen mendalam ini merupakan karakteristik adaptasi selain kerangka berpikir budaya yang beragam (*multiple cultural frameworks*) (Bennett, 2015, h. 523-528).

Integrasi (*Integration*)

Integrasi pada konteks awal *The Developmental Model of Intercultural Sensitivity* dijelaskan oleh Bennett (dalam Jackson, 2012, h. 372) sebagai tataran di mana para imigran berusaha mengembangkan hubungan yang harmonis dengan suku bangsa asli (*host nationals*) dengan tetap mempertahankan warisan budaya dan identitas budaya asli mereka. Konsep integrasi ini diperluas dan disesuaikan dalam konteks interaksi antarumat beragama oleh Morgan dan

Sandage (2016) yang menyatakan integrasi merupakan sebuah orientasi yang terus “menghidupi” adaptasi dan komitmen membangun hubungan antarumat beragama dalam cara-cara yang baik di tengah tekanan dan marginalitas yang sering kali turut mengiringi komitmen tersebut, “*An orientation that involves living out adaptation and commitments to inter-religious relationships in healthy ways amidst the stress and marginality that if often comes with those commitments*” (Morgan & Sandage, 2016, h. 129-158).

Komitmen untuk membangun hubungan yang harmonis diwujudkan secara nyata oleh komunitas umat Buddha dengan mendirikan forum kebangsaan. Forum ini akan mewadahi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan setiap kelompok agama untuk saling berinteraksi secara intens, salah satunya kegiatan olahraga.

Makanya kita ada membentuk forum kebangsaan, itu kan gabungan dari semua pemuda di berbagai agama, kan itu salah satu tujuannya itu. Saya pernah mengajukan, mengapa tidak bikin satu kegiatan, yang simple saja seperti pertandingan bola voli, antar umat beragama. Nanti ini kirim dari wihara mana, masjid mana, pemuda mana. (Informan kedua, ketua Majelis Buddhayana Indonesia Sumsel, wawancara, 12 September 2020)

Pada interaksi antarumat beragama di Palembang ini, setiap kelompok saling bertoleransi, menerima, menghormati keberadaan kelompok agama lain, dan menciptakan harmoni dalam batasan tidak mencampuradukkan ajaran agama yang satu dengan yang lain.

Kalau dari agama Islam, menimbang-nimbang, melihat, mengukur, dan juga menilai agama-agama yang lain ini, kami menganggap bahwa diri kami atau agama yang kami miliki yang kami emban saat ini ialah agama di tengah-tengah dan harus digarisbawahi kita boleh berbicara ini tanpa meyakini yang lain menganggap itu ada boleh, *tapi* tidak meyakini, saat saya meyakini bahwa saya akan terjatuh kepada kekufuran, mohon maaf ini kita sudah berbicara di lingkaran keyakinan dan ini bentuknya agak sedikit tipis saya berbicara ini pun tipis dan sangat sangat berbahaya di tali *aqidah* kalau meyakini tidak boleh, *tapi* kalau menganggap ada boleh kenapa karena dalilnya dalam surah Al-Baqarah yakni umat yang ada di tengah-tengah. (Informan ketiga, Ustadz dan pengurus aktif FPI Sumatra Selatan, wawancara, 12 September 2020)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa umat Muslim yang dipimpinya mampu sampai pada tataran integrasi, yakni berusaha menciptakan harmoni dengan umat lain dengan memosisikan diri sebagai “agama yang di tengah-tengah”. Komitmen untuk menjaga harmoni juga dilakukan oleh pemimpin agama Kristen dalam interaksi sosialnya di tengah masyarakat.

Saya misalnya diundang ada acara *yasinan*, *kawinan*, saya datang. Saya biasanya datang paling mereka berdoa ya silakan berdoa nah *gitu loh*, kalau baca ayat *Qur'an* oke silakan saya diam *aja gitu*, nah itu salah satu bentuk saya tuh menghargai mereka dan saya walaupun agama saya berbeda ya saya tuh bagian dari Bangsa Indonesia ini. (Informan pertama, pendeta sekaligus PEMBIMAS, wawancara, 1 September 2020)

Dalam kehidupan masyarakat yang multikultur, perdamaian akan tetap terjaga apabila masyarakat memiliki kecenderungan etnorelativisme. “*Ethnorelativism is linked to being comfortable with many standards and customs and to having an ability to adapt behavior and judgments to a variety of interpersonal settings*” (Bennett dalam Jackson, 2012, h. 313). Ketika masyarakat memiliki kecenderungan etnorelativisme, mereka memiliki perasaan nyaman saat berada di tengah perbedaan dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi budaya yang berbeda. Etnorelativisme termanifestasi dalam bentuk penerimaan perbedaan, adaptasi perbedaan, dan integrasi perbedaan.

PEMBAHASAN

Selain menganalisis dari perspektif sumber pemuka agama, penelitian ini juga menganalisis melalui sudut pandang media massa. Keberadaan media massa sebagai fungsi pengawasan sekaligus pemberi informasi kepada publik mengenai pentingnya isu tersebut dan keharusan diselesaikannya melalui berbagai formula alternatif yang bisa digagas oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok yang terlibat.

Memperbincangkan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari budaya. Rey (1997) menyatakan bahwa agama bukan hanya merupakan salah satu elemen dari budaya, agama juga dapat menjadi budaya itu sendiri karena memiliki asumsi, praktik, dan perspektif terhadap kehidupan (*world view*) yang dipegang bersama (Rey, 1997, h. 161). Sama seperti Devore dan Schlesinger (dalam Rey, 1997) yang memandang budaya

sebagai makna pandangan hidup (*the way of life*) yang diikuti oleh sekelompok orang, struktur perilaku, dan perspektif terhadap kehidupan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi antarumat beragama berhubungan erat dengan komunikasi antarbudaya.

Padapraktiknya, kehadiran media massa memiliki peran dalam mengedukasi nilai-nilai toleransi di masyarakat. Ade Armando dalam buku *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* karya Anis Malik Thoha melihat bahwa selama ini media kurang memperhatikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi. Penelusuran di berbagai situs media memperlihatkan bahwa kasus bernuansa agama seperti kasus penindasan hak beragama tidak diberitakan secara luas oleh media massa. Hanya terdapat beberapa media saja yang memberikan ruang, itu pun tidak ditempatkan secara menonjol. Kasus-kasus tersebut umumnya hanya ditampilkan dalam format *hard news* secara singkat dan padat tanpa dibarengi oleh penjelasan konteks masalah yang terjadi. Dalam hal ini, Ade Armando melihat bahwa media massa yang sebenarnya memiliki kemampuan lebih untuk menyoroti berbagai kasus intoleransi yang terjadi, justru malah mereduksi fungsinya menjadi lebih terbatas. Media massa yang diharapkan bisa menjadi perekat persatuan bangsa, justru memilih menghindar, sehingga membiarkan keretakan antarumat beragama terus berlangsung (Thoha, 2005, h. 20).

Terdapat istilah populer dalam ranah pemberitaan media, yakni *bad news is good news*. Istilah ini menunjukkan bahwa

dalam praktiknya media lebih menyoroti pemberitaan-pemberitaan yang memiliki unsur konflik di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan media dalam memberitakan kasus intoleransi yang pernah terjadi seperti kasus Poso, Ambon, Ahmadiyah, kasus Sampang, dan kasus bermuatan konflik antar agama lain. Media membingkai kasus tersebut dengan *war journalism* yakni dengan menonjolkan konflik yang mengakibatkan berita tersebut semakin panas. Pembingkai media ini secara tidak langsung membawa pembaca untuk larut dalam pemberitaan sehingga peristiwa yang seharusnya bersifat lokal menjadi meluas dan mengundang pihak lain dalam jangkauan yang lebih luas untuk larut kedalam konflik yang sama (Arif, 2016, h. 223).

Dalam kasus intoleransi umat beragama, media massa seharusnya menjadi salah satu kata kunci untuk mengurangi ketegangan, minimal mencegah merembetnya kasus-kasus sejenis. Hal ini dapat dilakukan ketika media massa mengedepankan pendekatan *peace journalism*. Namun dalam kenyataannya, banyak media massa lebih menyukai pendekatan *war journalism* yang sarat dengan konflik. Akibatnya bisa ditebak, pemberitaan yang dilakukan media massa seakan menjadi “api” bagi umat beragama. Kecenderungan media massa menggunakan pendekatan *war journalism* dalam pemberitaannya termasuk dalam kasus intoleransi beragama, tak lepas dari pemikiran konvensional yang dimiliki pelaku dan pengelola media. Terasa hambar rasanya ketika sebuah peristiwa tidak diberitakan secara berhadapan (*vis a vis/ konflik*), dan alasan klasik yang selalu diusung

media massa adalah mereka menyampaikan fakta apa adanya di masyarakat (*the mirror of reality*), padahal sejatinya media massa telah melakukan konstruksi realitas (*the create of reality*) (Arif, 2016, h. 219).

Toleransi umat beragama dalam kacamata jurnalistik juga tidak lepas dari bidikan wartawan. Jika dicoba diperbandingkan, berita manakah yang paling banyak dimuat antara berita toleransi dan intoleransi, pasti siapa pun berasumsi bahwa berita intoleransi lebih banyak dimuat daripada berita toleransi, meski sejatinya berita toleransi umat beragama juga dimuat. Ada dua hal yang dapat diajukan sebagai “bukti” asumsi tersebut. Pertama, paradigma yang dianut wartawan yang selalu menjadikan unsur sensasi dan konflik sebagai bingkai dalam memberitakan realitas berita. Kedua, pesimisme masyarakat dan anggapan masyarakat yang selalu tertuju pada kecurigaan bahwa wartawan selalu mencari-cari masalah dari sebuah realitas yang ujung-ujungnya menelisik hal-hal berbau konflik, termasuk persoalan keberagaman umat. Kasus-kasus keberagaman atau intoleransi umat beragama yang dimuat media massa menjadi salah satu instrumen yang mempekuat asumsi itu. Lihat saja kasus Poso, Ambon, Ahmadiyah, Sampang, dan kasus sejenis lainnya yang selalu dibingkai dalam *war journalism* dengan memosisikan sumber berita *vis a vis*, selalu fokus pada ranah konflik dan dikonflikkan. Akibatnya berita menjadi panas, bahkan makin panas, manakala khalayak luas membacanya dan larut dalam pemberitaan hingga peristiwa yang seharusnya bersifat lokal menjadi luas

karena mengundang pihak lain untuk ikut dan larut dalam peristiwa yang sama. Posisi pemberitaan seperti ini dalam konteks jurnalistik dikenal dengan istilah *media is creating reality*, media telah mengonstruksi realitas yang sama dalam konteks yang berbeda (Arif, 2016, h. 223).

Dalam upaya melihat jejak digital, penulis mencoba menelusuri jejak-jejak konflik agama melalui pemberitaan media lokal Palembang. Setidaknya dari pemberitaan media dapat dijadikan tolok ukur bahwa dalam konflik agama Palembang memang terbebas dari adanya konflik yang bermotif agama. Tidak mungkin apabila suatu kejadian yang mengundang reaksi yang besar luput dari pemberitaan. Melalui laman pencarian, penulis melakukan penelusuran dengan kata kunci “konflik agama di kota Palembang” di beberapa media lokal dan nasional turut memberitakannya. Sebagai amatan melalui media, penulis mencoba menelaah pemberitaan melalui kanal berita *Sumatera Ekspres* (Sumeks.co), *Times Indonesia* (timesindonesia.co.id), *Antara Sumsel* (Sumsel.antaranews.com), *Haluan Sumatera* (haluansumatera.com), dan *Republika* (Republika.co.id). Dalam upaya mempermudah pemetaan pencarian pemberitaan konflik agama di kota Palembang, penulis mencarinya berdasarkan kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir. Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, kebetulan Sumatra Selatan dan kota Palembang dipimpin oleh tokoh yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan jenis konflik agama dan penanganan dalam konflik agama yang terjadi.

Dalam pemberitaan melalui *Sumatera Ekspres* (20 Mei 2019), Gubernur Herman Deru mengingatkan warga masyarakat Sumatra Selatan untuk tidak menciptakan suasana konflik, baik konflik yang dilandasi karena kepentingan politik, maupun konflik yang disulut oleh masalah agama. Dalam perspektif pemberitaan, Herman Deru memberikan pernyataan bahwa siapa pun yang memicu konflik di Sumatra Selatan dianggap sebagai bukan warga Sumatra Selatan. Dalam berita yang sama, Herman Deru juga memberikan peringatan terhadap semua elemen masyarakat untuk mengingat sejarah bangsa ini bahwa bangsa ini merdeka atas dasar keberagaman, baik suku, ras, maupun agama. Artinya, menjaga kerukunan dalam tatanan perbedaan itu menjadi suatu hal yang penting dan harus dilakukan secara bersama-sama. Di lain sisi, dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Palembang, juga dibutuhkan adanya forum silaturahmi antarumat beragama. Hal ini dilakukan sebagai upaya dan langkah konkrit pemerintah dan aparat keamanan

kota Palembang untuk menjaga keamanan. Dari media-media lokal yang ditelusuri oleh penulis, ada kecenderungan natural bahwa konflik agama tidak terjadi di Palembang. Pemberitaan yang menonjol dari sisi konflik agama adalah kecenderungan pemberitaan tentang bagaimana penanganan konflik yang dilakukan oleh pemangku kebijakan.

Dua sudut pandang analisis yang dilakukan dalam penelitian ini (media massa dan tokoh agama) menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik agama ini dilakukan melalui forum resmi FKUB. *Frame* berita juga tidak mengarah pada konflik yang menyebabkan kerusuhan. Terkait penerimaan masing-masing umat beragama dalam memandang dan menyikapi perbedaan agama, dari wawancara mendalam yang dilakukan tampak bahwa mereka memiliki *intercultural mind* yang dewasa. Keluwesan setiap kelompok agama dan pemimpin agamanya dalam memaknai dan menyikapi perbedaan yang merupakan hasil dari pembahasan diringkas dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Ringkasan *Developmental Model of Intercultural Sensitivity* dalam Interaksi Antarumat Buddha, Kristen, dan Islam di Palembang

Tataran	Penjelasan	Temuan di Lapangan
<i>Denial</i>	Orientasi yang memiliki kesulitan dalam menerima perbedaan agama yang terwujud dalam tindakan penghindaran umat beragama lainnya secara umum.	Tidak ada penghindaran atau pemisahan antara satu kelompok agama dengan kelompok agama lain. Konflik pembangunan rumah ibadah lebih kepada kritik atas kebijakan pemerintah, penolakan pembangunan rumah ibadah kelompok agama minoritas muncul namun tidak tereskalasi dan dipicu oleh segelintir oknum saja.
<i>Defense</i>	Orientasi dalam memaknai perbedaan agama secara kaku dan mengategorikan kelompok agama sendiri sebagai superior dan kelompok agama lain inferior. Dicitrakan dengan <i>mindset</i> yang terpolarisasi.	Stereotip dan prasangka yang diberikan <i>outgroups</i> terhadap <i>ingroups</i> dalam beberapa interaksi masih muncul. Dalam interaksi antarumat (kegiatan bakti sosial), nuansa stereotip terhadap etnis Tionghoa masih dan prasangka kegiatan bakti sosial sebagai upaya kristenisasi juga muncul.
<i>Minimization</i>	Orientasi yang menggolongkan hal-hal yang sama dari kategori-kategori umat beragama lainnya.	Terdapat <i>transcendent universalism</i> (pencarian persamaan prinsip dalam aturan hukum, hak asasi manusia, nilai agama), "Semua agama mengajarkan kebaikan"

Tataran	Penjelasan	Temuan di Lapangan
<i>Acceptance</i>	Orientasi yang memungkinkan seseorang atau kelompok agama untuk menerima dan mengapresiasi perbedaan agama sementara masih memiliki preferensi pada perspektif maupun kelompok agama sendiri. Orientasi ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas kognitif dan keluwesan (fleksibilitas) emosi.	<i>Mindset</i> yang terpolarisasi “kita” versus “mereka” tidak lagi muncul. Setiap kelompok mampu memahami segala sesuatu dari perspektif kelompok lain, bukan berpusat pada persepektif kelompok sendiri. Hal ini tampak saat masalah penistaan agama di media sosial oleh netizen di Palembang muncul dapat diselesaikan tanpa prasangka ataupun kekerasan.
<i>Adaptation</i>	Orientasi yang tidak hanya menerima perbedaan agama, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan. Dalam interaksi lintas agama mampu bertindak dengan penuh rasa hormat/menghargai dan bertindak dengan cara-cara yang tepat.	Empati antarumat beragama tampak melalui kegiatan gotong royong, saling membantu saat ada yang membutuhkan, serta tampak dari pluralisme yang menonjol.
<i>Integration</i>	Orientasi yang melibatkan komitmen untuk beradaptasi dan menjalin hubungan antarumat beragama (Morgan & Sandage, 2016, h. 143).	Masing-masing kelompok agama berkomitmen untuk menjaga kerukunan dalam interaksi sosial mereka. Pemimpin umat Buddha membuat forum kebangsaan, yaitu gabungan pemuda dari berbagai agama yang bertujuan memupuk kerukunan melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga bersama.

Sumber: Olahan Peneliti

SIMPULAN

Setiap kelompok agama berupaya mewujudkan etnorelativisme melalui toleransi, gotong royong membangun rumah ibadah, dan hubungan pertemanan dengan pemeluk berbeda. Namun, dalam beberapa tataran, prasangka dan stereotip berbasis etnisitas terhadap umat berbeda masih muncul. Penulis menemukan bahwa konflik yang dipicu perbedaan agama dapat diredam karena peran pemimpin agama yang dapat mengarahkan jemaahnya untuk memiliki *cultural mind* yang dewasa, tidak menebar kebencian, dan mampu menerima perbedaan, beradaptasi, dan melakukan integrasi.

Sementara sentimen agama di Kota Palembang justru muncul karena stereotip etnis yang mengakar. Prasangka terhadap penganut Kristen justru muncul karena kecurigaan terhadap upaya kristenisasi pada saat kelompok pemeluk Kristen melakukan kegiatan sosial. Padahal dalam

lingkup gereja kegiatan sosial ini memang ada bidangnya yang memiliki fungsi sebagai upaya pemerataan kesejahteraan umat Kristen dan kelompok masyarakat lain. Sementara itu, sentimen terhadap umat Buddha lebih disebabkan oleh sentimen rasisme, sehingga kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok umat Buddha beberapa kali mengalami penolakan. Berdasarkan perspektif pemimpin Islam, sentimen paling banyak muncul justru berasal dari media sosial, bukan berasal dari interaksi sosial sehari-hari.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sensitivitas antarbudaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok agama sudah dikelola dengan baik dan terlihat dari corak etnorelativisme yang dominan. Kelompok Islam memandang perbedaan agama sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi. Kelompok Kristen selalu membuka peluang mendiskusikan

agama dengan catatan batasan tidak memperdebatkan hal prinsip dalam keyakinan. Pandangan Budha sendiri melihat bahwa perbedaan adalah warna tersendiri, serta makin banyak warna akan menghasilkan sesuatu yang indah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ameli, R. S., & Molaei, H. (2012). Religious affiliation and Intercultural sensitivity: Interculturality between Shie & Sunni Muslims in Iran. *Internasional Journal of Intercultural Relations*, 36, 31–40.
- Arif, M. C. (2016). Toleransi umat beragama dalam konstruksi wartawan Surabaya. *Jurnal Komunikasi Islam*, 16(2), 217–247.
- Bennett, J. M. (2015). *The SAGE encyclopedia of intercultural competence*. California, US: SAGE Publications.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Fuller, T. L. (2007). Study abroad experiences and intercultural sensitivity among graduate theological students: A preliminary and exploratory investigation. *Christian Higher Education*, 6(4), 321–332.
- Idi, A. (2018). *Konflik etno-Religijs di Asia Tenggara*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS.
- Jackson, J. (2012). *Introducing Language and Intercultural Communication*. UK: Routledge.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan prasangka dalam konflik etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 87–104.
- Karim, K. M., Saili, S. A., & Khambali, K. M. (2014). Role of religious leader in interfaith dialogue towards conflict resolution: An Islamic perspective. *International Journal of Education and Research*, 2(6), 77–88.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Littlejohn, S. W., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication eleventh edition*. Illinois, US: Waveland Press.
- Morgan, J., & Sandage, S. (2016). A developmental model of interreligious competence: A conceptual framework. *Archive for the Psychology of Religion*, 38(2), 129–158.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Reisgl, M. (2007). Discrimination in discourse. In H. Kotthoff & H. Spencer-Oatey (Eds.), *Handbook of Intercultural Communication* (pp. 365–409). Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.
- Rey, L. D. (1997). Religion as invisible culture: Knowing about and knowing with. *Journal of Family Social Work*, 2(2), 159–177.
- Rizki, R. (2020, June 26). Kemenag bahas SKB 2 menteri soal rumah ibadah jadi perpres. www.cnnindonesia.com/nasional/20200625202934-20-517627/kemenag-bahas-skb-2-menteri-soal-rumah-ibadah-jadi-perpres. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>
- Simons, H. (2009). *Case study research in practice*. California, US: Sage.
- Swanborn, P. (2010). *Case Study Research: What, Why and How?* California, US: Sage.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: Tinjauan kritis*. Yogyakarta, Indonesia: Gema Insani.
- Welianto, A. (2020, February 6). Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all
- Yin, R. (2014). *Case study research (5th ed.)*. California, US: Sage.